

**TINGKAT EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU DAN KABUPATEN MESUJI**

(Tesis)

OLEH

M. FAJAR NOVRIANSYAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**TINGKAT EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN MESUJI**

Oleh :

M. FAJAR NOVRIANSYAH

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

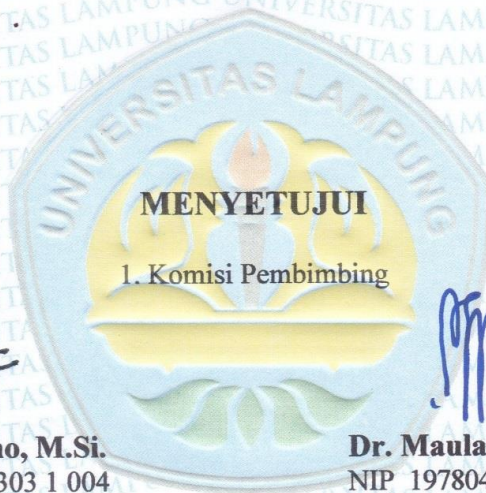
Judul Tesis : **TINGKAT EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN
KABUPATEN MESUJI**

Nama Mahasiswa : **M. Fajar Novriansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1926021003**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508 199303 1 004

Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.
NIP 19780430 200812 1 001

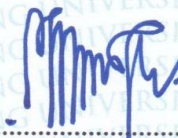
**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

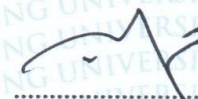
Ketua : **Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.**



Penguji Utama : **Dr. Syarief Makhya**

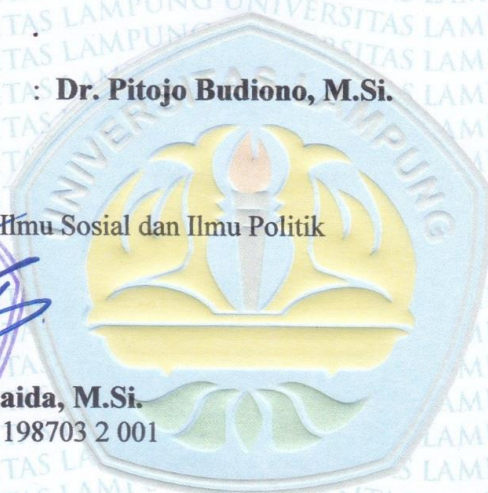


Sekretaris : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **06 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan



M Fajar Novriansyah
NPM. 1926021003

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Muhammad Fajar Novriansyah. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 November 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah



hati dari pasangan Bapak Marwansyah dan Ibu Aprianti.

Pendidikan Formal yang penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Qurrota A'yun Bandar Lampung tahun 2002-2003, Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Raya tahun 2003-2006, Sekolah Dasar di SD

Muhammadiyah 1 tahun 2006-2009, Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015.

Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana dengan menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 dan lulus pada bulan april tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke pascasarjana dengan terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2019 dengan mengambil konsentrasi Manajemen Pemerintahan.

MOTTO

“Bung, kamu anak pertama. Kamu harus sukses dan menjadi contoh yang terbaik untuk adik-adikmu.”
(Drs. Arif Maryata)

“Jar, jika kamu tidak optimis dan yakin terhadap kesuksesan di depan mu. Bagaimana kesuksesan itu akan yakin datang kepadamu, optimis dan yakinlah kesuksesan menunggu mu di depan”
(Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP)

“Janganlah kamu risau perihal dunia, karena hidupmu telah dirancang oleh Sang Pemilik Alam Semesta. Percayalah bahwa semua takdir itu baik, jika kamu merasa takdir mu tak sesuai keinginanmu yakinlah Allah SWT telah merencanakan hal yang tidak pernah kamu duga”
(Anonim)

“Rajin bisa menjadi kepribadianmu, tetapi kemalasan akan selalu menghantuimu. Berusaha melakukan yang terbaik dan titip kata KONSISTEN untuk aktivitas setiap harinya”
(M. Fajar Novriansyah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'aalamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu, sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan di tengah pandemi Virus Covid-19

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak tesis ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Aku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Papa dan Mama tercinta serta Adik-Adikku yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staff atau Karyawan dan Teman-Teman seperjuangan di Magister Ilmu Pemerintahan, semoga Allah SWT menjadikan amal kebaikan yang telah dilakukan sebagai amal jariyah.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA



Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas tuntunan dan pengetahuannya sehingga kita dapat berada di jaman yang terang benderang seperti ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hertanto, M.SI, Ph.D. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak. Dr. Maulana Mukhlis, M.IP. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis terlebih lagi ilmu yang telah diberikan kepada penulis, meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan serta saran yang membantu dalam proses pembelajaran mengenai tema penelitian saya untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian terhadap penulis yang bapak berikan.
5. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis terlebih lagi meluangkan banyak waktu tenaga maupun pikiran dalam memberikan banyak masukan guna terciptanya tesis ini. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian terhadap penulis yang bapak berikan.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran. Terimakasih Pak Syarief, selain sebagai dosen pembahas Pak Syarief juga memiliki kontribusi penuh dalam perbaikan tesis ini menjadi lebih baik dan terstruktur. Masukan dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepada dosen-dosen Magister Ilmu Pemerintahan, Terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan dapat peneliti implementasikan untuk mencapai semua harapan dan cita-cita.
8. Terima kasih kepada Bapak Enda Faksi Jaya, Ibu Intan Ferlina, Waskita Joko Suryanto, Bapak Ali Alhamidi, Bapak A. Dany Samantha D, Bapak M. Rois Mandala, Bapak Novi Analan, Bapak Daliman, Ibu Yulinar, Ibu Eka, Keluarga Karyono & Yanti dan Bapak Ahmad Muzaki atas waktu serta informasi yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Ibunda dan Ayahanda tercinta “Aprianti, S.Ag dan Drs. Marwansyah” atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT

selalu memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ibunda dan Ayahanda.

10. Adik kandung penulis “M Akbar Aji Negara dan M Faiz Akmal”. Terima kasih atas segala doa, semangat, cinta dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita serta semoga dipermudah jalannya dalam mencapai semua apa yang telah diharapkan.
11. Terima kasih kepada orang terkhusus dan terkasih “Dinda Utami Putri, S.P” yang telah bersedia menjadi my support system selain keluargaku. Terima kasih atas semangat, support, perhatian dan pengertiannya. Ini bukanlah akhir perjuangan karena kita masih dalam proses perjuangan untuk masa depan berdua yang baik dan perjuangan kehidupan yang sebenarnya baru akan dimulai, semoga saling menikmati dengan berbahagia dalam setiap langkah perjuangan.
12. Terima kasih kepada Mahasiswa Pembahas Mbak Ulfa Umayasari, Ni Kadek Poniasih, dan Mbak Zikriyanti Kurnia Dini atas waktunya untuk memberikan segala masukan yang memberikan perkembangan terhadap draft penelitian tesisku. Terima kasih pula untuk Forum Group Discussion yaitu Widya Novita Lukitasari & Annisa Erlitsya Marchelina yang telah membantu memberikan saran dan kritik. Kemudian untuk abang-abangku Bang Tyas Apriza, Bang Danni Pangaribowo, dan Bang Muhammad Shidiq terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan kepada peneliti.
13. Terima kasih kepada teman-teman Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan’19 yang telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan perkuliahan peneliti.

Bandar Lampung, 6 Oktober 2021

M. Fajar Novriansyah

ABSTRAK

TINGKAT EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN MESUJI

Oleh:

M Fajar Novriansyah

Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji mempunyai perbedaan dalam hal jumlah penerimaan PAD serta perbedaan dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji merupakan daerah yang lahir secara bersamaan dengan karakteristik masyarakat yang sama yaitu berbasis dari sektor pertanian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tingkat efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode pendekatan analisis data sekunder. Data dalam penelitian ini menggunakan rumus rasio efektivitas PAD dalam menganalisis hasil penerimaan PAD. Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa tingkat efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji bersifat *fluktuatif*, dalam 5 tahun terakhir rata-rata rasio efektivitas yang didapatkan Kabupaten Pringsewu termasuk ke dalam kriteria sangat efektif sedangkan Kabupaten Mesuji dengan rata-rata rasio efektivitas yang termasuk ke dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas PAD yang dimiliki Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah sangat rendah karena dalam 5 tahun terakhir kontribusi PAD tersebut tidak pernah di atas 10% dari pendapatan daerah. Faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji yaitu *intensifikasi* dan *ekstensifikasi*. Hal tersebut sangat berpengaruh dilakukan karena mempengaruhi jumlah penerimaan PAD. *Intensifikasi* dan *ekstensifikasi* berhasil membuat tingkat efektivitas PAD yang termasuk kriteria efektif, akan tetapi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah karena dipengaruhi oleh tingginya derajat sentralisasi perpajakan. Jenis pajak utama yang produktif di Kabupaten diambil alih oleh Pemerintah Pusat, walaupun pajak daerah di Kabupaten beragam tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD.

Kata kunci : Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

LEVEL OF EFFECTIVENESS OF REGIONAL ORIGINAL INCOME PRINGSEWU DISTRICT AND MESUJI DISTRICT

By:

M Fajar Novriansyah

Pringsewu Regency and Mesuji Regency have differences in terms of the amount of PAD revenue and differences in balancing funds provided by the Central Government. Pringsewu Regency and Mesuji Regency are regions that were born simultaneously with the same community characteristics, namely based on the agricultural sector. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of PAD and its contribution to regional income and the factors that influence PAD revenue. This type of research is descriptive quantitative with secondary data analysis approach. The data in this study uses the PAD effectiveness ratio formula in analyzing the results of PAD receipts. The results of this study are that the level of effectiveness of PAD in Pringsewu Regency and Mesuji Regency is fluctuating, in the last 5 years the average effectiveness ratio obtained by Pringsewu Regency is included in the very effective criteria, while Mesuji Regency with an average effectiveness ratio is included in the effective criteria. The effectiveness level of PAD owned by Pringsewu Regency and Mesuji Regency has a very low contribution to regional income because in the last 5 years the PAD contribution has never been above 10% of regional income. Factors that influence the amount of PAD revenue in Pringsewu and Mesuji districts are intensification and extensification. This is very influential because it affects the amount of PAD receipts. Intensification and extensification succeeded in making the level of effectiveness of PAD which is included in the effective criteria, but the contribution of PAD to regional income is very low because it is influenced by the high degree of centralization of taxation. The main types of productive taxes in the District are taken over by the Central Government, although local taxes in the Districts vary but only a few can be relied on as a source of PAD revenue.

Keyword : Effectiveness, Regional Original Income

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
RIWAYAT HIDUP	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
SANWACANA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Otonomi Daerah	14
2.2 Konsep Desentralisasi	15
2.3 Pendapatan Daerah.....	19
2.4 Efektivitas PAD	26
2.5 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	32
3.2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	33
3.3. Fokus Penelitian.....	34
3.4. Informan.....	36
3.5. Sumber Data.....	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7. Teknik Pengolahan Data	39
3.8. Teknik Analisis Data.....	40
3.9. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
IV. GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN	
4.1. Kabupaten Pringsewu	43
4.2. Kabupaten Mesuji	46
4.3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu	48

4.4.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.....	49
------	---	----

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.	Efektivitas PAD dan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	51
A.	Rasio Efektivitas PAD dan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.....	52
B.	Rasio Efektivitas PAD dan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.....	68
5.2.	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan PAD.....	84
A.	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu	84
B.	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Mesuji	97
5.3.	Analisis Perbandingan Tingkat Efektivitas PAD Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah dan Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PAD.....	107

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1.	Simpulan	123
6.2.	Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Karakteristik Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	3
Tabel 2. Karakteristik Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji	4
Tabel 3. Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji 2016-2020	5
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji	6
Tabel 5. Perbedaan Penerimaan PAD serta Dana Perimbangan Daerah Perkotaan dan Daerah Rural Tahun 2020	7
Tabel 6. Kategori Desentralisasi menurut Tujuan dan Instrumen.....	16
Tabel 7. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	27
Tabel 8. Kriteria Kontribusi	28
Tabel 9. Data Informan Dalam Penelitian	36
Tabel 10. Daftar Kecamatan di Kabupaten Pringsewu	44
Tabel 11. Persebaran Penduduk per Kecamatan	44
Tabel 12. Angka Ketergantungan Penduduk	46
Tabel 13. Luas Daerah per Kecamatan	48
Tabel 14. Populasi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2010 dan 2018.	48
Tabel 15. Struktur Struktur kepengurusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu	49
Tabel 16. Struktur Struktur kepengurusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji	50
Tabel 17. Realisasi dan Target PAD Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	52
Tabel 18. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016	54
Tabel 19. Realisasi dan Target PAD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.....	55
Tabel 20. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017	56

Tabel 21. Realisasi dan Target PAD Tahun 2018.....	58
Tabel 22. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018	59
Tabel 23. Realisasi dan Target PAD Tahun 2019	61
Tabel 24. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019	62
Tabel 25. Realisasi dan Target PAD Tahun 2020.....	64
Tabel 26. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020	65
Tabel 27. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020	66
Tabel 28. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020.....	67
Tabel 29. Realisasi dan Target PAD Kabupaten Mesuji Tahun 2016	69
Tabel 30. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016	70
Tabel 31. Realisasi dan Target PAD Kabupaten Mesuji Tahun 2017	72
Tabel 32. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017	73
Tabel 33. Realisasi dan Target PAD Kabupaten Mesuji Tahun 2018	74
Tabel 34. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018	75
Tabel 35. Realisasi dan Target PAD Kabupaten Mesuji Tahun 2019	77
Tabel 36. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019	78
Tabel 37. Realisasi dan Target PAD Kabupaten Mesuji Tahun 2020	79
Tabel 38. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020	81
Tabel 39. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Mesuji Tahun 2016-2020	82
Tabel 40. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016-2020	83
Tabel 41. Rata-Rata Pengeluaran perKapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Kabupaten Pringsewu, 2020	92
Tabel 42. Pencapaian Target Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019	93
Tabel 43. Pencapaian Target Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020	93

Tabel 44. Hasil Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Mesuji 2016-2020.....	98
Tabel 45. Rata-Rata Pengeluaran perKapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Kabupaten Mesuji, 2019-2020.....	101
Tabel 46. Data Jumlah Penduduk, IPM, dan PDRB Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji Tahun 2016-2020	111
Tabel 47. Data Perhitungan Dana Perimbangan per KM.....	113
Tabel 48. Pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Pringsewu serta Kabupaten Mesuji tahun 2016-2020.....	115
Tabel 49. Persentase Ketergantungan terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji tahun 2016-2020.....	117
Tabel 50. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji	119
Tabel 51. Perhitungan laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah luas wilayah terhadap dana perimbangan yang diterima daerah	131
Tabel 52. Rasio Efektivitas PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2019	131
Tabel 53. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2019.....	131

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	31
Gambar 2. Diagram Piramida Penduduk	45
Gambar 3. Peta Kabupaten Mesuji.....	46
Gambar 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mesuji (km ²)	47
Gambar 5. Sosialisasi dan Edukasi SDM Bapenda Pringsewu.....	88
Gambar 6. SDM Bapenda Metro Melakukan Studi Pembelajaran	89
Gambar 7. Ruang Unit Pelayanan Pajak Daerah	90
Gambar 8. Konsumsi & Pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Pringsewu	91
Gambar 9. Pendataan Bapenda Terkait Retribusi Jasa Parkir	100
Gambar 10. Penatausahaan Oleh Staf Bapenda Kabupaten Mesuji.....	103
Gambar 11. Pengawasan Oleh Staf Bapenda Kabupaten Mesuji	106
Gambar 12. Grafik Penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji.....	107
Gambar 13. Grafik Tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji	108
Gambar 14. Grafik Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu	109
Gambar 15. Grafik Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Mesuji	109

DAFTAR SINGKATAN

ADS	: Analisis Data Sekunder
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KM	: Kilometer
MBLB	: Mineral Bukan Logam Batuan
MCP	: Monitoring Centre For Prevention
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDRB	: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RT	: Rukun Tetangga
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
UPT	: Unit Pelayanan Tugas
UU	: Undang-Undang
WP	: Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di daerah tidak akan berjalan tanpa adanya anggaran untuk menjalankan pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah kemudian dibahas bersama dan disetujui oleh DPRD. Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan pengelolaannya khususnya di bidang keuangan. Menurut Rahmayati (2016:41) satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD dan pembiayaan lainnya untuk kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem desentralisasi yang menjadi perwujudan dari adanya otonomi daerah menuntut daerah agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mendapatkan serta mengelola dana untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber keuangannya sendiri. Hal itu berdampak kepada munculnya berbagai kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Pada bidang pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah daerah berupaya fokus dan selalu mengarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut salah satu upaya peningkatan PAD adalah *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pajak dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun

menggali sumber-sumber baru. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan mengetahui apakah PAD yang didapatkan efektif atau tidak.¹

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan PAD yang merupakan sumber pendapatan daerah. Unsur-unsur dalam pendapatan daerah adalah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Unsur-unsur yang terdapat dalam pendapatan daerah tersebut menjadi cerminan terhadap kemampuan fiskal dari setiap daerah, sedangkan kebutuhan daerah dilihat dari jumlah penduduk, keadaan geografis, dan tingkat kemakmuran rakyatnya dengan memperhatikan kelompok miskin. Sehingga pada prinsipnya tingkat besaran ketergantungan dana perimbangan terhadap pemerintah pusat dilihat dari selisih kemampuan daerah dengan kebutuhan daerah.

Besar kecilnya dana perimbangan menjadi tolok ukur celah fiskal dari setiap daerah. Dana perimbangan digunakan untuk menutupi celah yang terjadi karena kebutuhan daerah lebih besar dari potensi penerimaan daerah yang ada. Dana perimbangan akan lebih kecil kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang relatif besar, kemudian perolehan dana perimbangan yang relatif besar akan diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal yang relatif kecil. Tingkat ketergantungan finansial atau dana perimbangan mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat perolehan PAD. Perolehan PAD tidak mampu menutupi kebutuhan daerah, sehingga daerah mempunyai tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang tertinggi dan PAD terendah. PAD sebagai instrumen kebijakan pemerintah seharusnya dapat menunjukkan kinerja yang baik, karena berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggali,

¹<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/06/19/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-pad-terhadapkinerja-keuangan-pada-pemerintah-kabupaten-dan-kota/> diakses pada 17 Desember 2020 Pukul 08.00 WIB

mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerahnya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat (Rahmawati dkk, 2016:1769). Seperti halnya Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, adapun gambaran singkat karakteristik Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	PAD (Tahun 2019)	Dana Perimbangan (Tahun 2019)	IPM (Tahun 2019)	Jumlah Penduduk *ribu (Tahun 2019)	PDRB *persen (Tahun 2019)
1	Kab. Lampung Barat	65,267,416,665	791.712.917.260	67,50	302,83	5,19
2	Kab. Lampung Selatan	275,464,317,224	1.398.455.089.730	68,22	1011,29	5,13
3	Kab. Lampung Tengah	193,634,175,310	1.797.258.034.498	70,16	1281,31	5,35
4	Kab. Lampung Utara	102,587,471,150	1.244.666.930.848	67,63	616,90	5,33
5	Kab. Lampung Timur	147,527,535,828	1.475.128.391.944	69,34	1044,32	3,81
6	Kab. Tanggamus	76,050,778,580	1.131.249.311.788	66,37	598,30	5,02
7	Kab. Tulang Bawang	82,379,613,623	823.127.374.731	68,23	450,90	5,41
8	Kab. Way Kanan	62,353,560,984	990.355.064.471	67,19	450,11	5,17
9	Kota Bandar Lampung	627,296,544,827	1.400.623.202.255	77,33	1051,50	6,21
10	Kota Metro	176,199,324,166	641.899.006.676	76,77	167,41	5,58
11	Kab. Pesawaran	65,693,842,719	895.181.485.501	65,75	444,38	5,00
12	Kab. Pringsewu	86,313,480,516	859.198.408.361	69,97	400,19	5,04
13	Kab. Mesuji	45,620,663,052	632.875.492.470	63,52	200,20	5,26
14	Kab. Tulang Bawang Barat	32,410,517,401	674.827.807.842	65,93	273,22	5,36
15	Kab. Pesisir Barat	29,323,369,726	587.653.782.034	63,79	154,90	5,37

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

Berdasarkan tabel 1, setiap daerah yang ada di Provinsi Lampung mempunyai dana perimbangan yang tinggi dan tidak diikuti dengan PAD yang tinggi. Tabel 1 akan digunakan sebagai pembandingan dana perimbangan dan PAD, kemudian menjadi bahan analisis formulasi pemberian dana alokasi umum (DAU). Perbedaan jumlah penerimaan PAD dan juga kebutuhan daerah akan mempengaruhi jumlah dana perimbangan dari pusat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan penerimaan pendapatan daerah. Perbedaan dalam penerimaan pendapatan daerah inilah yang menyebabkan prioritas pembangunan Kabupaten juga akan berbeda, karena jumlah

anggaran yang diperoleh dan digunakan berbeda. Seperti halnya penerimaan PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten yang akan menjadi studi pada penelitian ini yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009.² Hampir sama dengan Pringsewu, pada tanggal 29 Oktober 2008, DPR RI melalui sidang paripurna mengesahkan RUU Pembentukan Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung yang kemudian tanggal pada tanggal 3 April 2009 Kabupaten Mesuji diresmikan.³ Adapun gambaran singkat karakteristik Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Karakteristik Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji

No	Indikator	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten Mesuji
1	Tahun Pembentukan	26 November 2008	26 November 2008
2	Diresmikan	3 April 2009	3 April 2009
3	Luas Wilayah	625 Km ²	2.184 Km ²
4	Jumlah Penduduk (Proyeksi 2018)	397.219 Jiwa	199.168 Jiwa
5	Indeks Pembangunan Manusia (2018)	69.42	62.88
6	Jumlah Penduduk Miskin (2018)	10.50	7.55
7	Persentase Penduduk Miskin (2018)	41.64	15.01
8	Laju PDRB (2018)	5.03	5.31
9	Mata pencaharian utama penduduk	Pertanian	Pertanian

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 2 luas wilayah Mesuji yaitu 2.184 Km² sedangkan Pringsewu hanya seluas 625 Km². Luas wilayah tersebut berbeda dua kali lipat, akan tetapi dengan luas wilayah tersebut Mesuji mempunyai jumlah penduduk yang lebih sedikit dari pada Pringsewu. Perbedaan jumlah penduduk Pringsewu ini juga hampir sebanyak dua kali lipat dari jumlah penduduk Mesuji. Dari jumlah penduduk Pringsewu indeks pembangunan manusia yang diperoleh sebesar 69.42% sedangkan Mesuji indeks pembangunan manusianya sebesar 62.88%. Terdapat

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, *Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2019* (Pringsewu: Badan Pusat Statistik, 2019).

³<https://mesujikab.go.id/selayang-pandang/sejarah-kabupaten-mesuji/> diakses pada 13 September 2020 pukul 14.00 WIB

perbedaan antara kedua Kabupaten ini, sehingga menyebabkan adanya perbedaan terhadap penerimaan jumlah PAD yang dimiliki keduanya. Perbedaan jumlah PAD juga menyebabkan perbedaan dalam hal penerimaan APBD sehingga prioritas pembangunan Kabupaten juga akan berbeda, karena jumlah anggaran yang diperoleh dan digunakan berbeda.

Perbedaan inilah yang menjadi dasar peneliti untuk menganalisis tingkat efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah sehingga menjadi faktor indikasi kemandirian suatu daerah terhadap dana perimbangan yang didapatkan. Perbedaan karakteristik setiap daerah menyebabkan perbedaan terhadap penerimaan PAD dan berpengaruh terhadap dana perimbangan yang didapatkan oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Salah satu sumber penerimaan dari pendapatan daerah adalah PAD. PAD merupakan pendapatan yang didapatkan dari penghasilan daerah itu sendiri seperti Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini akan lebih banyak membahas mengenai PAD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji karena permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu PAD. Adapun target dan realisasi PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji 2016-2020

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
2016	Pringsewu	70.600.000.000	14.110.000.000	3.140.000.000	1.350.000.000	52.000.000.000
	Mesuji	28.718.079.000	4.966.000.000	5.608.200.000	1.300.000.000	16.843.879.000
2017	Pringsewu	117.629.412.764	17.935.953.758	2.845.430.508	836.477.507	96.011.550.991
	Mesuji	36.224.899.000	7.128.750.000	10.999.673.000	1.252.597.000	16.843.879.000
2018	Pringsewu	82.534.500.000	18.952.500.000	4.484.000.000	1.350.000.000	57.748.000.000
	Mesuji	41.025.735.777	7.316.250.000	12.613.009.777	1.252.597.000	19.843.879.000
2019	Pringsewu	87.997.304.000	21.287.750.000	4.488.614.000	2.250.000.000	59.970.940.000
	Mesuji	38.896.476.000	9.405.000.000	8.395.000.000	1.252.597.000	19.843.879.000
2020	Pringsewu	118.298.703.256	31.000.838.400	6.406.185.000	2.250.000.000	78.641.679.856
	Mesuji	47.207.416.981	11.557.500.000	11.386.000.000	1.606.943.093	22.656.973.888

Sumber : Laporan Target APBD Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pringsewu

Tabel 3 merupakan tabel target PAD yang akan digunakan untuk membandingkan target yang ingin dicapai dengan realisasi yang dilakukan oleh Kabupaten

Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. PAD yang ditargetkan merupakan sebuah harapan daerah dalam mendapatkan penerimaan PAD, oleh sebab itu kemampuan daerah untuk merencanakan dan melaksanakan akan menjadi aspek yang akan membandingkan target dengan realisasi yang dicapai. Adapun data realisasi PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil		
				Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
2016	Pringsewu	68.157.777.766	15.582.621.369	3.181.924.372	626.298.954	48.766.933.071
	Mesuji	27.783.046.527	4.434.683.124	3.040.365.946	1.252.597.907	19.055.399.550
2017	Pringsewu	77.798.900.000	16.906.000.000	4.102.000.000	1.230.000.000	55.560.900.000
	Mesuji	22.114.016.973	7.373.015.840	1.366.932.444	1.056.603.166	12.317.465.523
2018	Pringsewu	71.824.582.142	21.289.348.703	3.327.703.407	1.660.233.852	45.547.296.179
	Mesuji	33.206.360.523	9.104.368.004	3.095.413.082	1.067.293.191	19.939.286.245
2019	Pringsewu	86.313.480.516	23.521.005.222	3.441.509.866	1.785.492.326	57.565.473.102
	Mesuji	45.620.663.052	11.578.664.204	7.331.167.322	1.606.943.093	25.103.888.433
2020	Pringsewu	97.105.458.737	30.887.603.100	3.448.446.199	2.315.375.440	60.464.033.998
	Mesuji	45.161.742.025	18.684.286.816	2.146.738.177	1.736.531.580	22.594.185.452

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pringsewu

Tabel 3 merupakan data laporan target PAD, kemudian tabel 4 merupakan data laporan realisasi PAD. Tabel 3 dan tabel 4 akan digunakan sebagai data pembandingan untuk menganalisis tingkat efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Berdasarkan Tabel 4 PAD dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Pringsewu selalu lebih besar jika dibandingkan dengan PAD Kabupaten Mesuji. Perbedaan PAD tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta IPM, jika dilihat pada tabel 1 jumlah penduduk dan IPM Kabupaten Pringsewu lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mesuji. Hal tersebut diperkuat oleh Asmuruf dkk (2015:736) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal itu berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD akan meningkat. Menurut Asmuruf dkk (2015:736), pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sehingga berdasarkan tabel 1 PDRB Kabupaten Mesuji lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pringsewu akan tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD yang diterima.

Pringsewu mempunyai PAD pada tahun 2020 sebesar Rp. 97.105.458.737 dan Mesuji pada tahun 2020 mempunyai PAD sebesar Rp. 45.161.742.025 terdapat

perbedaan PAD antara kedua kabupaten ini begitu juga dengan dana perimbangan yang diperoleh. Kabupaten Pringsewu merupakan daerah rural akan tetapi sebagai daerah penyangga kota yang dekat dengan kota dan mempunyai tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Sedangkan, Kabupaten Mesuji merupakan daerah yang jauh perkotaan yang termasuk daerah rural. Pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan yang terdiri dari pajak, retribusi, bagi hasil perusahaan daerah, serta pinjaman daerah. Selain itu dana masih masuk ke kas negara namun ada pemberian bagi hasil bagi daerah seperti bagi hasil perimbangan. Beberapa hal inilah yang menyebabkan setiap daerah memiliki PAD berbeda-beda antara daerah urban (kota), sub urban (penyangga), serta rural (pedesaan) dan perbedaan PAD inilah yang terjadi di Provinsi Lampung dengan data sebagai berikut :

Tabel 5. Perbedaan Penerimaan PAD serta Dana Perimbangan Daerah Perkotaan dan Daerah Rural Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PAD	Dana Perimbangan
1	Kab. Pringsewu	97.105.458.737	777.649.665.719
2	Kab. Mesuji	45.161.742.025	517.619.973.058
3	Kota Bandar Lampung	1.130.709.788.662	1.452.991.685.000

Sumber : APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (2021)

Berdasarkan tabel 5 bahwa daerah kota yang diwakilkan oleh Kota Bandar Lampung dan daerah rural yang diwakilkan oleh Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji mempunyai perbedaan dalam penerimaan PAD dan juga dana perimbangan yang didapatkan. Kabupaten Pringsewu dengan jumlah penerimaan PAD sebesar 97 M serta dana perimbangan sebesar 777 M, Kabupaten Mesuji sebesar 45 M serta dana perimbangan sebesar 517 M, dan Kota Bandar Lampung sebesar 1 Triliun serta dana perimbangan sebesar 1 Triliun. Sumber penerimaan PAD daerah Kota lebih banyak dari pada sumber penerimaan PAD di Kabupaten, kemudian juga kebutuhan fiskal daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan di Kabupaten sehingga menyebabkan perbedaan.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang berhubungan dengan efektivitas PAD. Penelitian pertama oleh Yaneka Julastiana dan Wayan Suartana dengan judul jurnal

yaitu Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Hasil analisis data menunjukkan, tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 70,97 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 112,36 persen.

Penelitian di atas tidak menggambarkan tingkat efektivitas penerimaan PAD secara keseluruhan dari keempat sumber penerimaan, karena dalam penelitian ini terfokus pada sumber penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Hal inilah yang menjadi perbedaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan karena tingkat efektivitas penerimaan PAD dilihat dari keempat sumber penerimaan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode perhitungan yang sama untuk mengetahui rasio efektivitas dan kriteria efektivitas penerimaan PAD.

Penelitian kedua oleh Asnariza, Abubakar Hamzah, Nur Syechalad (2014) dengan judul yaitu Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari analisis mengenai efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah Kota Sabang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi, efektivitas dan elastisitas. Hasil penelitian menjelaskan pungutan PAD di Kota Sabang semakin efisien setiap tahunnya dengan pengeluaran biaya semakin kecil sebagaimana yang tergambar dari rasio efisiensi. Pungutan PAD di Kota Sabang sudah dilaksanakan secara efektif setiap tahun dengan tingkat pencapaian target lebih dari 100%. Kecuali tahun 2005, pungutan PAD belum dilaksanakan secara efektif. Perkembangan ekonomi sangat berdampak dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Sabang dengan nilai koefisien elastisitas positif di atas 1%, kecuali tahun 2009. Koefisien elastisitas pungutan PAD tahun 2009 adalah negatif dan lebih dari 1%, artinya perkembangan ekonomi akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan PAD.

Penelitian di atas merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis data-data yang ada. Sama dengan yang peneliti lakukan dalam penelitian yang peneliti lakukan sehingga referensi penelitian kedua ini membantu peneliti dalam menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian. Persamaan selanjutnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dalam menganalisis PAD, akan tetapi perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan rasio efektivitas saja. Penelitian ini menggunakan rasio efisiensi, efektivitas dan elastisitas untuk menganalisis pemungutan PAD yang berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan hanya menggunakan rasio efektivitas untuk menganalisis penerimaan PAD.

Penelitian ketiga oleh Gusti Ayu Sonia Wina Laksmi dan Ni Luh Supadmi (2014) dengan judul jurnal yaitu Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010 - 2012 tergolong ekonomis.

Penelitian di atas menjadi referensi dalam penelitian yang peneliti lakukan karena dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas PAD dan kontribusinya pada pendapatan daerah. Penelitian ini menjadi gambaran terhadap penelitian yang peneliti lakukan dan perbedaannya terhadap penelitian yang peneliti lakukan yaitu daerah penelitian serta karakteristik daerah tersebut.

Penelitian keempat oleh Mauli Luzia Eka Safitri (2015) dengan judul jurnal yaitu Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah. Studi ini bertujuan untuk menunjukkan secara empiris efektivitas Pencapaian Target Pendapatan Asli

Daerah Di Kabupaten/Kota di Lampung. Realisasi Anggaran Dari laporan ini diperoleh data jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Dari data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio keuangan rasio kemandirian dan efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Aktual Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari tahun 2010-2012 sudah sangat efektif, yang artinya pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD dengan baik.

Penelitian kelima oleh Jaka Sriyana(2009) dengan judul jurnal yaitu Analisis Kapasitas Fiskal Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini membahas mengenai kapasitas fiskal di kabupaten gunung kidul. Studi ini mengevaluasi desentralisasi fiskal, memfokuskan pada kapasitas fiskal sebagai dampak dari fiskal antar pemerintah transfer pemerataan, dalam kasus Gunung Kidul, Yogyakarta. Studi tersebut menunjukkan persentase yang rendah dari pendapatannya sendiri dibandingkan dengan total anggarannya. Ini menunjukkan kegagalan kebijakan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan fiskal pemerintah daerah kapasitas.

Referensi penelitian terdahulu keempat dan kelima merupakan gambaran penelitian yang membantu peneliti dalam menganalisis hasil rasio efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Hasil rasio efektivitas PAD dianalisis dengan mendapatkan gambaran dari hasil penelitian terdahulu. Perbedaan dengan penelitian keempat dan kelima yaitu fokus dalam penelitian keempat adalah efektivitas pencapaian target PAD dan kelima adalah mengenai kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu yang peneliti gunakan pada penelitian ini, ada beberapa persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai tingkat efektivitas penerimaan PAD yang menggunakan rasio efektivitas PAD untuk menganalisisnya. Kemudian persamaan lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis menggunakan data sekunder seperti referensi terdahulu yang membantu memberikan gambaran terhadap penggunaan analisis data sekunder.

Selanjutnya, penelitian terdahulu menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai panduan dalam menganalisis mengenai efektivitas PAD dan kontribusinya pada pendapatan daerah.

Berdasarkan persamaan yang telah diulas pada penelitian terdahulu mengenai efektivitas PAD. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai tingkat efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta dampaknya terhadap dana perimbangan. Tingkat efektivitas pada penelitian ini menggambarkan keberagaman penerimaan PAD tiap tahunnya, baik penurunan maupun peningkatan PAD yang diterima. Data PAD yang digunakan yaitu tahun 2016-2020, sehingga dalam waktu 5 tahun terakhir akan menggambarkan tingkat efektivitas daerah.

Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji karena Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji mewakili karakteristik daerah rural dan daerah pemekaran yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten yang basis penerimaannya relatif sama yang bersumber dari pertanian. Secara teoritis kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji cenderung sangat rendah sehingga perlunya penelitian ini untuk mendapatkan jawaban terkait kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang rendah. Dipilihnya Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji dengan pertimbangan untuk melakukan evaluasi efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta dampaknya terhadap dana perimbangan yang didapatkan oleh Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji ?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis dari beberapa masalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta dampaknya terhadap dana perimbangan yang didapatkan oleh Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji.
2. Menganalisis terkait faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu pemerintahan dalam hal studi politik keuangan daerah khususnya mengenai PAD. Penelitian ini akan menjadi sebuah gambaran atau informasi serta acuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD. Sehingga, mengetahui upaya peningkatan PAD yang dilakukan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji serta mendapatkan saran atas penelitian yang telah dilakukan untuk membantu memberikan strategi untuk mendapatkan PAD yang lebih efektif.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui efektivitas PAD serta kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Tingkat efektivitas dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi dan target PAD, kemudian kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diketahui dengan membandingkan jumlah PAD yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai

acuan untuk lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini membahas mengenai tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Sejalan dengan hadirnya penelitian ini, peneliti mengetahui dinamika penerimaan PAD khususnya pada Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Penelitian ini tidak untuk membandingkan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji atau untuk membandingkan Kabupaten mana yang lebih baik, penelitian ini sebagai gambaran informasi apa yang perlu diperhatikan untuk kemajuan penerimaan PAD dari kedua kabupaten tersebut. Penelitian ini berfokus pada PAD oleh karena itu penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel yang lebih mendalam bagi penelitian yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos* yang artinya sendiri dan pemerintah. Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah, yaitu pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*) dan yang kedua adalah efisiensi efektivitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai, akan mengakibatkan daerah bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat.

Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah. Apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai maka dari hal ini akan mengakibatkan daerah bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah. Oleh karena itu perlu suatu upaya oleh pemerintah daerah dalam memutus ketergantungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah. Menurut Ibnu Syamsi dalam Emelia (2006) terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran agar suatu daerah dikatakan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri :

1. Kemampuan struktur organisasinya struktur organisasi pemerintah daerah yang mampu menampung seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah aparatur pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang diinginkan daerah dibutuhkan keahlian, moral, disiplin dan kejujuran dari aparatur daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah.
4. Kemampuan keuangan daerah suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila pemerintah daerah tersebut mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.2 Konsep Desentralisasi

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Desentralisasi pada dasarnya dapat dapat dibedakan pada 3 bagian besar yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti kesejahteraan daerah yang dapat diwujudkan dengan adanya desentralisasi fiskal yang efektif serta efisien.

Rondinelli dan Cheema (1983:24-25) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan *parastatal* (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, Rondinelli (1983:189) memberikan 4 dimensi desentralisasi yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Kategori Desentralisasi menurut Tujuan dan Instrumen

No	Kategori Desentralisasi	Tujuan	Instrumen
1	Desentralisasi politik	Meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik	Perbedaan konstitusi dan undang-undang, pengembangan partai politik, penguatan legislatif, pembentukan institusi politik lokal, pendukung kelompok kepentingan publik yang efektif
2	Desentralisasi administrasi	Memperbaiki efisiensi manajemen dalam penyediaan layanan public	Dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda.
3	Desentralisasi fiskal	Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.	Pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan
4	Desentralisasi ekonomi dan pasar	Menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme Pasar	Transfer fungsi pemerintahan kepada organisasi bisnis, kelompok masyarakat atau ornop melalui privatisasi dan penguatan ekonomi pasar melalui deregulasi

Sumber : Rondinelli (2000)

Adapun penjelasan mengenai desentralisasi fiskal sebagai berikut :

A. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Khusaini 2006:29). Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*).
- 2) Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang di dalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*).
- 3) Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Dilakukannya desentralisasi fiskal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam otonomi daerah. Otonomi daerah yang dilakukan pasca reformasi muncul disebabkan oleh tuntutan agar dilakukannya desentralisasi kekuasaan dari sentralistik orde baru. Pemerintah pusat melakukan pembagian urusan pemerintahan dan pendelegasian wewenang antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa. Pendelegasian wewenang yang dilakukan bukan hanya melakukan desentralisasi kekuasaan dan fungsi semata namun juga dilakukannya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan dalam rangka kewajiban pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sudah diberikan rambu-rambu oleh pemerintah pusat hanya boleh mengelola pendapatan yang terdiri dari pajak, retribusi, bagi hasil perusahaan daerah, serta pinjaman daerah. Di luar itu dana masih masuk ke kas

negara namun ada pemberian bagi hasil bagi daerah seperti bagi hasil perimbangan. Pada dasarnya setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda. PAD diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam PAD, seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu (Musgrave, 1984:6) :

1) Alokasi

Fungsi alokasi sangat terkait erat dengan kewenangan utama bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat menyediakan.

2) Distribusi

Adalah peran pemerintah dalam perekonomian dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal.

3) Stabilisasi

Adalah peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilitas perekonomian secara makro (*agregat*) misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi variabel ekonomi makro dengan berbagai instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan demikian fungsi ini lebih banyak dimiliki pemerintah pusat dibanding pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian

daerah dibatasi. Dengan demikian teori generasi kedua ini mendasarkan pada 2 mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horizontal antar pemerintah daerah, interaksi vertikal antar level pemerintahan. Mekanisme tersebut adalah :

- a. Dalam keadaan pasar barang dan jasa mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa-jasa publik. Persaingan antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya jika peraturan pemerintah daerah dan penyediaan barang/jasa publik tidak bersahabat dengan pasar dan masyarakat, maka akan menimbulkan mobilitas faktor produksi ke daerah lain dan selanjutnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
- b. Keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah juga menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah. Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat yang besar akan menimbulkan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dengan demikian perbedaan pokok kedua teori tersebut adalah terletak pada pandangan *revenue transfer*. Keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta pembatasan redistribusi pemerintah pusat kepada daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam melakukan reformasi orientasi pasar.

2.3 Pendapatan Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Pendapatan daerah merupakan penerimaan keuangan daerah yang didapatkan dari beberapa sumber yaitu :

A. Tinjauan Tentang PAD

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009:48). PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Daerah dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola dan mendapatkan

PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber penerimaan PAD adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:1). Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulator*). Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi smith's canons yang terdiri dari unsur keadilan (*equity*), unsur kepastian (*certainty*), unsur kelayakan (*convenience*), efisien (*efficiency*), dan unsur ketepatan (*adequacy*) (Halim dan Iqbal, 2012:202). Besarnya tarif pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibagi dalam 2 jenis meliputi :

1. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari beberapa hal yaitu :
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.
2. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;

- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar) yang merupakan pungutan yang sifatnya budgetair tidak menonjol. Retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda jenis dan ragamnya tergantung potensi yang ada di tiap-tiap daerah. Secara umum retribusi dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012:104), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan yang termasuk dalam PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Secara umum masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dan penerimaan PAD. Permasalahan pengelolaan dan penerimaan PAD menurut Firdausy (2018:68) dapat dikelompokkan serta dianalisis dalam 3 kelompok utama yaitu :

a. Perencanaan

Pada indikator ini, ingin mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan daerah ataupun dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya untuk memperoleh PAD yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Banyak hal yang mungkin direncanakan oleh daerah dan jenis-jenis sumber pendapatan apa saja yang menjadi fokus untuk dikembangkan untuk memperoleh hasil penerimaan yang efektif.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Selanjutnya, dalam indikator pelaksanaan dan penatausahaan. Bagaimana implementasi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk

penatausahaan, bagaimana hasil pelaksanaan itu dituangkan ke dalam sistem pelaporan yang ada. Dalam indikator ini juga akan mengetahui bagaimana koordinasi antar lembaga yang terkait dengan PAD dalam pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Dalam indikator ini apa yang sudah direncanakan dan diimplementasikan dilihat bagaimana kesesuaian dengan pelaporan. Ketidaksesuaian laporan dengan pelaksanaan yang terjadi bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana serta sesuai pula dengan apa yang dilaporkan. Pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam permasalahan penerimaan PAD. Ketidaksesuaian pelaporan akan menyebabkan kerugian kepada daerah dan seperti apa pertanggungjawaban yang dihasilkan dari hal tersebut dan dimana letak pengawasan jika hal itu terjadi.

Dari analisis 3 kelompok utama di atas akan menghasilkan faktor apa saja yang menjadi hambatan, masalah, atau kelebihan yang ada pada PAD di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Kemudian, setelah adanya analisis tersebut dapat memberikan strategi pengelolaan PAD untuk Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji yang dapat dibagi juga menjadi 3 pengelompokan strategi menurut Firdausy (2018:68) yaitu :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

B. Tinjauan Tentang Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Adapun dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana darurat dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Semua pendapatan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

2.4 Efektivitas PAD

A. Efektivitas PAD

Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila kegiatan yang ada mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Munir dkk. 2004:43).

Devas dkk (1989:111) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Mesuji dapat dilihat dari efektivitas bagaimana kabupaten mencapai target dari PAD yang telah ada yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian dengan membandingkan antara realisasi serta target dari PAD, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut menurut Halim (2004 : 129).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD (rPAD)}}{\text{Target PAD (tPAD)}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD dapat dikategorikan efektif apabila realisasi PAD mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Tabel 7. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Keputusan Mendagri Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

B. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Kontribusi adalah Sumbangan. Sedangkan Menurut Kamus Ekonomi Guritmo (1992:76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai

kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern yakni pemerintah pusat dan provinsi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari PAD. Cara untuk mengukur kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan menghitung rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tinggi atau rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat dikategorikan sangat baik apabila PAD berkontribusi di atas 50% dari pendapatan daerah. Adapun kriteria penilaian kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, sesuai dengan kriteria menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Tabel 8. Kriteria Kontribusi

Kontribusi	Kriteria Kontribusi
Di atas 50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,10% - 40,00%	Cukup Baik
20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
Kurang dari 10%	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

2.5 Kerangka Pikir

Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji merupakan bagian dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kedua kabupaten ini merupakan daerah pemekaran yang dibentuk pada tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009, akan tetapi terdapat perbedaan dari PAD yang diperoleh kedua kabupaten ini. Pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan yang terdiri dari pajak, retribusi, bagi hasil perusahaan daerah, serta pinjaman daerah. Di luar itu dana masih masuk ke kas negara namun daerah diberikan dana bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan dana perimbangan.

Kesenjangan terhadap penerimaan PAD tiap daerah yang ada di Provinsi Lampung dan juga kebutuhan daerah yang beragam membuat perbedaan terhadap dana perimbangan yang dibagikan. Sehingga setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda, sama halnya dengan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Perbedaan PAD yang terjadi di antara kedua kabupaten ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait tingkat efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji dan faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD serta efisiensi dana perimbangan yang diberikan.

Dari beberapa masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas PAD dan bagaimana PAD berkontribusi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji serta menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD. Untuk menganalisis mengenai tingkat efektivitas PAD menggunakan rumus menurut Halim (2004:129) yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD (rPAD)}}{\text{Target PAD (tPAD)}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan kriteria efektivitas PAD menurut Kemendagri seperti pada tabel 7. Selanjutnya untuk dapat mengetahui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan rumus yaitu :

$$\text{Kontribusi Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Hasil perolehan yang didapatkan dengan membandingkan antara pendapatan daerah dan PAD disesuaikan dengan kriteria kontribusi seperti pada tabel 8. Kemudian, terkait dengan faktor yang mempengaruhi PAD dianalisis menggunakan pandangan dari Firdausy (2018:68) mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD yang dapat dikelompokkan serta dianalisis dalam 3 kelompok utama yaitu :

a. Perencanaan

Pada indikator ini, ingin mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan daerah ataupun dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya untuk memperoleh PAD yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

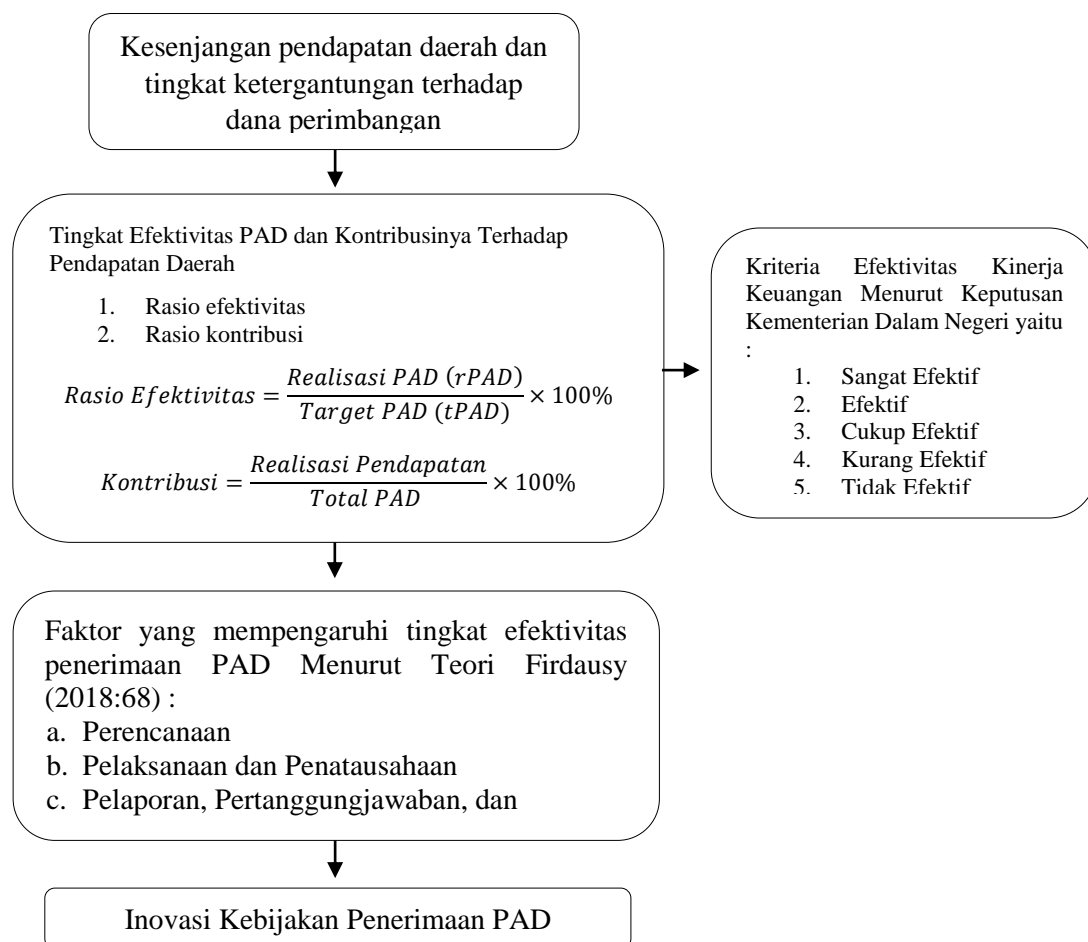
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Selanjutnya, dalam indikator pelaksanaan dan penatausahaan. Bagaimana implementasi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk penatausahaan, bagaimana hasil pelaksanaan itu dituangkan ke dalam sistem pelaporan yang ada.

c. Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Dalam indikator ini apa yang sudah direncanakan dan diimplementasikan dilihat bagaimana kesesuaian dengan pelaporan. Ketidaksesuaian pelaporan dengan pelaksanaan yang terjadi bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana serta sesuai pula dengan apa yang dilaporkan.

Permasalahan di dalam penelitian ini akan dideskripsikan serta dianalisis, untuk menganalisis masalah utama yang sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian tidak melebar dari fokus masalah sehingga berguna untuk memberikan saran di akhir penelitian dalam menentukan permasalahan yang terjadi dalam penerimaan PAD dan upaya peningkatan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan PAD yang didasari atas hasil temuan penelitian. Adapun alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

Berdasarkan gambar 1 tentang kerangka pikir dapat dijelaskan bahwa alur kerangka pikir yaitu dimulai dari adanya kesenjangan terkait dengan jumlah penerimaan PAD yang ada di Provinsi Lampung khususnya pada Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Kabupaten ini mempunyai jumlah penerimaan PAD yang jauh berbeda karena hampir 2 kali lipat perbedaan PAD yang dimiliki Kabupaten Pringsewu dibandingkan dengan Kabupaten Mesuji. Jumlah penerimaan PAD yang berbeda ini adakah dampaknya terhadap tingkat efektivitas PAD dan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sehingga menyebabkan ketergantungan akan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian juga faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji yang berguna untuk membantu memberikan gambaran terkait inovasi untuk mendapatkan PAD yang lebih efektif

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mengungkapkan suatu masalah apa adanya. Menurut Arikunto (2005:26) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Menurut Arikunto (2006:12) dengan penelitian kuantitatif, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

Jenis penelitian ini menggunakan studi komparasi. Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris yaitu *compare* yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

Metode komparasi ini digunakan dengan maksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan fokus penelitian yang ada. Bertujuan agar mengetahui persamaan serta perbedaan dari tingkat efektivitas PAD, kontribusinya terhadap pendapatan daerah, serta dampak efektivitas PAD dalam penerimaan dana perimbangan. Studi komparasi dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara tingkat efektivitas penerimaan PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji, strategi yang diterapkan kedua daerah, serta efisiensi dana perimbangan yang diberikan.

Digunakannya metode deskriptif kuantitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini mempunyai masalah yang bersifat deskriptif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Kajian mengenai tingkat efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta dampaknya akan dana perimbangan yang didapatkan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji membutuhkan data yang sifatnya statistik atau diperhitungkan menggunakan sistem angka. Data yang bersifat angka atau statistik hanya sebagai bantuan untuk menganalisis permasalahan dalam melihat, meninjau dan menggambarkan tentang objek yang diteliti.

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi yang telah dijelaskan dalam latar belakang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dari penjelasan mengenai permasalahan dapat diringkas bahwa hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian dengan judul tingkat efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

1. Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten yang basis penerimaan PAD nya relatif sama yang bersumber dari pertanian.
2. Secara teoritis kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji cenderung sangat rendah sehingga perlunya

penelitian ini mendapatkan jawaban terkait kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang rendah.

3. Dipilihnya Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji dengan pertimbangan untuk melakukan evaluasi efektivitas PAD dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir.
4. Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji mewakili karakteristik daerah rural dan daerah pemekaran yang ada di Provinsi Lampung.

3.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, rumusan masalah tersebut menjadi fokus dari penelitian dan menjadi batasan dalam penelitian ini sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi rumusan dan fokus masalah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data di lapangan, teknik pengumpulan data yang bersifat statistik dan angka serta data tambahan didapatkan melalui laporan APBD kemudian untuk menganalisis data tersebut menggunakan wawancara mendalam serta studi dokumentasi.

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh sebab itu maka fokus penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji
Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji didapatkan dengan membandingkan realisasi dan target PAD. Hasil perhitungan kemudian disesuaikan dengan kriteria efektivitas penerimaan PAD.
2. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan hasil perhitungan jumlah penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah, hasil perhitungan disesuaikan dengan kriteria kontribusi.

3. Tingkat efektivitas PAD serta dampaknya terhadap dana perimbangan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji

Pada fokus penelitian ini akan mengetahui bahwa jumlah penerimaan PAD dan tingkat efektivitas PAD apakah berdampak terhadap dana perimbangan yang didapatkan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji.

4. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji

Menganalisis tentang aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang berguna untuk memberikan saran di akhir penelitian dalam penentuan kebijakan peningkatan PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji menggunakan pandangan menurut Firdausy (2018:68) yaitu :

- a. Perencanaan

Pada indikator ini, ingin mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan daerah ataupun dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya untuk memperoleh PAD yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Selanjutnya, dalam indikator pelaksanaan dan penatausahaan. Bagaimana implementasi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk penatausahaan, bagaimana hasil pelaksanaan itu dituangkan ke dalam sistem pelaporan yang ada.

- c. Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Dalam indikator ini apa yang sudah direncanakan dan diimplementasikan dilihat bagaimana kesesuaian dengan pelaporan. Ketidaksesuaian pelaporan dengan pelaksanaan yang terjadi bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana bentuk pengawasan yang

dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana serta sesuai pula dengan apa yang dilaporkan.

3.4. Informan

Di dalam memahami penelitian yang lebih dalam, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancan penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti di dalam kancan penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dan Nugroho, 2014:9).

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih karena memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menentukan informan penelitian yang memahami serta memiliki informasi yang sangat relevan dengan penelitian sehingga memiliki tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Peneliti memahami situasi dan kondisi dilapangan yang terkadang berbeda dengan apa yang diharapkan. Peneliti memfokuskan informan Kepala Bapenda Kabupaten Pringsewu, Kepala Bapenda Kabupaten Mesuji, dan masyarakat yang terlibat membayar retribusi dan pajak daerah di Kabupaten Pringsewu dan Mesuji. Berikut adalah data informan dalam penelitian ini :

Tabel 9. Data Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Waskita Joko Suryanto, S.H, S.IP, M.H	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu
2	Ali Alhamidi, S.P	Kepala Bidang Pendapatan
3	A. Dany Samantha D, S.E, M.M	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan
4	Intan Ferlina, S.Pd	Staf Bapenda Kabupaten Pringsewu
5	Yulinar	Masyarakat Pembayar Pajak di Kabupaten Pringsewu
6	Daliman	Masyarakat Pembayar Pajak di Kabupaten Pringsewu
8	M. Rois Mandala, S.H, M.Kn	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji
9	Novi Analan	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
10	Karyono & Yanti	Masyarakat Pembayar Pajak di Kabupaten Mesuji
11	Ahmad Muzaki	Masyarakat Pembayar Pajak di Kabupaten Mesuji

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

3.5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sehingga menggunakan pendekatan analisis data sekunder (ADS). Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan melalui suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini sumber utama didapatkan melalui data sekunder yang berupa laporan APBD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji kemudian diperkuat dengan metode wawancara (data primer). Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi menjadi 2 jenis, yakni :

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer. Data tersebut berguna untuk memperkuat data dari data primer yang berupa :

- a) Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020
- b) Laporan Realisasi APBD Kabupaten Mesuji Tahun 2016-2020
- c) Profil Daerah Kabupaten Pringsewu
- d) Profil Daerah Kabupaten Mesuji

2. Data Primer

Menurut Purhantara (2010:79) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dan Mesuji. Sumber data primer digunakan untuk menganalisis rasio efektivitas PAD dan melihat tingkat efektivitas kinerja keuangan menurut Depdagri.

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari informan seperti wawancara. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan seperti yang telah peneliti jelaskan pada

tabel 9 tentang daftar informan. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara, jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berbagai macam teknik pengumpulan data, akan tetapi yang paling umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2016:225). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber data sekunder diperoleh dari laporan APBD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji, sedangkan sumber data primer merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari subjek penelitian langsung. Metode pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian- pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Bungin, 2011:100). Wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), dan wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) (Esterberg dalam Sugiyono, 2016:233).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara, peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber melalui tatap muka serta mengetahui gestur dan mimik tubuh narasumber secara langsung sebagai bentuk pernyataan komunikasi

verbal. Melalui wawancara, data yang didapatkan lebih akurat dan langsung dari sumbernya. Metode wawancara yang peneliti gunakan yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan memakai panduan wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumen dan *record* dibedakan definisinya oleh (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2014:216-217) sebagai berikut : *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting dan dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban narasumber. Dokumentasi juga menjadi acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam jangka waktu yang belum begitu lama.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data terdiri dari :

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data laporan APBD dan data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus

pedoman wawancara serta menyeleksi data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang menyinggung dan merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:233). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian). Di Dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan yang bertujuan agar semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data pada penelitian ini akan berbentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Pada tahap verifikasi data, peneliti melakukan pemilihan dan penggunaan penulisan yang tepat serta padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

3.9. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sesuatu hal penting di dalam proses penelitian, karena keabsahan data merupakan penentuan kelayakan apakah sebuah penelitian itu menggunakan data benar adanya atau hanya *hoax* belaka. Menurut Moleong (2014:324) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu memenuhi uji *credibility* (validitas internal/Kepercayaan), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Kemudian di dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksa keabsahan data yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan dengan beberapa hal seperti perpanjangan pengamatan, membandingkan data yang didapatkan, dan triangulasi. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data atau dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang ada. Triangulasi dengan teknik berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui teknik pengamatan yang berbeda dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dibandingkan dengan data yang diperoleh dari wawancara.

IV. GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

4.1. Kabupaten Pringsewu

A. Geografi

Secara geografis Wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104°42' – 105°8' Bujur Timur dan antara 5° 8' – 6°8' Lintang Selatan. Batas-batas Wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas Wilayah daratan 625 km², yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

B. Administrasi Pemerintahan

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya yang ditunjuk sebagai Pj. Bupati Pringsewu untuk yang pertama kali adalah Ir. H. Masdullhaq, yang memimpin pemerintahan di Kabupaten Pringsewu yang kemudian digantikan oleh H. Helmi Machmud, dan digantikan kembali oleh Sudarno Edi, dan Bupati Pringsewu saat ini dijabat oleh Hi. Sujadi Saddat. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9

(sembilan) wilayah Kecamatan, adapun Kecamatan di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

Tabel 10. Daftar Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No	Nama Kecamatan	Ibukota
1	Pardasuka	Pardasuka
2	Ambarawa	Ambarawa
3	Pagelaran	Gumuk Mas
4	Pagelaran Utara	Fajar Mulya
5	Pringsewu	Pringsewu
6	Gading Rejo	Gading Rejo
7	Sukoharjo	Sukoharjo
8	Banyumas	Banyumas
9	Adiluwih	Adiluwih

Sumber : BPS Tahun 2019

C. Penduduk

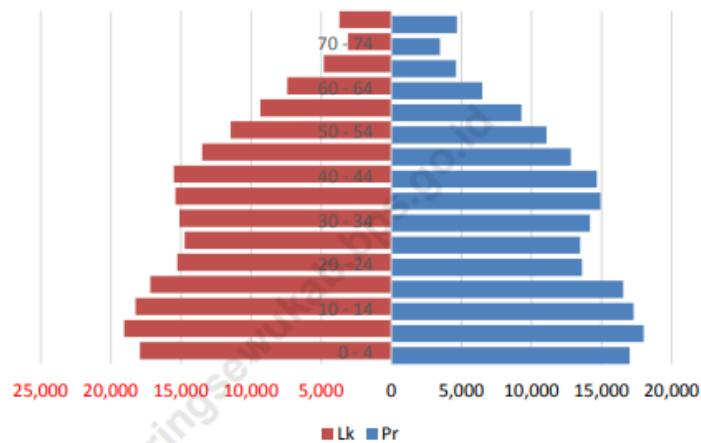
Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pringsewu jumlah penduduk Pringsewu pada tahun 2008 berjumlah 351.093 jiwa. Banyaknya penduduk Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 397.219 jiwa yang terdiri dari laki-laki 203.282 jiwa dan perempuan 193.937 jiwa. Sex Ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 104,82 yang berarti bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk rata-rata sekitar 636 jiwa per kilometer persegi. Secara rinci persebaran penduduk per Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Persebaran Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (KM ²)	Kepadatan (Jiwa/KM ²)
1	Pardasuka	35.066	96,64	371
2	Ambarawa	38.425	30,99	1.125
3	Pagelaran	47.067	72,47	649
4	Pagelaran Utara	15.850	100,28	158
5	Pringsewu	84.088	53,29	1.578
6	Gading Rejo	74.482	85,71	869
7	Sukoharjo	49.315	72,95	676
8	Banyumas	20.959	39,85	526
9	Adiluwih	35.540	74,82	475
	Pringsewu	397.219	625,00	636

Sumber : BPS Tahun 2019

Dari data tersebut, Kecamatan Pringsewu merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sekitar 1.578 jiwa/Km², dan yang paling jarang adalah Kecamatan Pagelaran Utara yaitu hanya sekitar 158 jiwa/Km².



Gambar 2. Diagram Piramida Penduduk
Sumber : BPS Tahun 2019

Komposisi penduduk dapat dibagi menurut umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk sangat penting untuk menjadi dasar perencanaan pemerintah dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang bisnis. Pengetahuan mengenai struktur umur penduduk di suatu wilayah diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan yang pasti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu contoh misalnya jika penduduk suatu wilayah banyak yang termasuk dalam kelompok umur balita maka kebutuhan akan fasilitas kesehatan balita dan peningkatan gizi akan menjadi hal yang sangat penting.

Piramida penduduk di atas menunjukkan struktur penduduk di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) dan umur produktif (15-64 tahun). Lebih dari 27% penduduk Kabupaten Pringsewu berumur antara 0-14 tahun dan 66% merupakan penduduk usia produktif. Dari piramida tersebut, dapat terlihat bahwa angka kelahiran di Kabupaten Pringsewu masih relatif tinggi, meskipun sudah mulai menurun dibanding tahun sebelumnya. Salah satu indikator kependudukan yang berhubungan dengan komposisi umur penduduk adalah Dependency Ratio (DR).

Dependency ratio secara umum menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil dependency ratio, semakin kecil pula beban kelompok usia produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif dan sebaliknya. Dengan tabel penjelasan sebagai berikut :

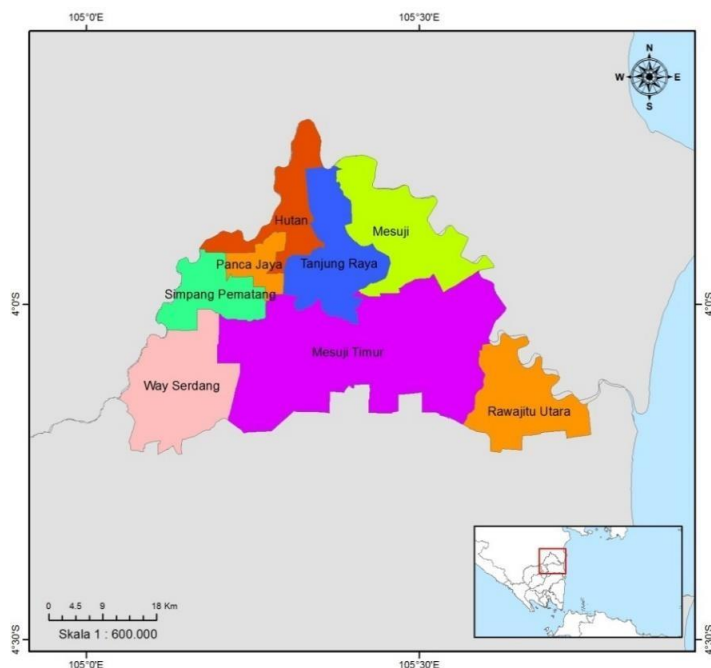
Tabel 12. Angka Ketergantungan Penduduk

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
0 - 14 Tahun	55.174	52.361	107.535
15 - 64 Tahun	136.067	128.394	264.461
65 + Tahun	12.041	13.182	25.233
Angka Ketergantungan	49,40	51,05	51,20

Sumber : BPS Tahun 2019

Pada tahun 2018, dependency ratio atau dikenal juga sebagai angka ketergantungan di Kabupaten Pringsewu sebesar 50,20%. Artinya, setiap satu penduduk usia tidak produktif menjadi tanggungan 2 orang penduduk usia produktif.

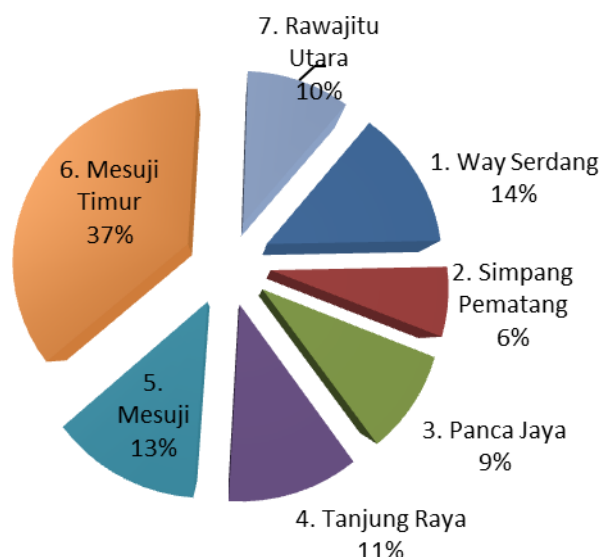
4.2. Kabupaten Mesuji



Gambar 3. Peta Kabupaten Mesuji

Sumber : BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2019

Secara Geografis Kabupaten Mesuji, di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di Sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Mesuji tercatat 2.184 Km². Kecamatan Mesuji Timur merupakan Kecamatan terluas (810,20 Km²), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Simpang Pematang (139,61 Km²) Wilayah Kabupaten Mesuji merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Kabupaten Mesuji memiliki satu sungai utama yang melintasi hampir seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Mesuji. Sungai tersebut adalah Sungai Mesuji. Selain sungai utama tersebut, terdapat juga beberapa sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Mesuji antara lain Sungai Sidang, Sungai Buaya dan Sungai Gebang. Adapun luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Mesuji sebagai berikut :



Gambar 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mesuji (km²)

Sumber : BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2019

Dengan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 13. Luas Daerah per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Km ²
1	Way Serdang	Bukoposo	294.42
2	Simpang Pematang	Simpang Pematang	139.61
3	Panja Jaya	Adi Luhur	197.72
4	Tanjung Raya	Brabasan	238.07
5	Mesuji	Wiralaga	274.73
6	Mesuji Timur	Tanjung Mas Makmur	810.20
7	Rawajitu Utara	Panggung Jaya	229.25
Mesuji			2184.00

Sumber : BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2019

Penduduk Kabupaten Mesuji berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 199.168 jiwa yang terdiri atas 104.094 jiwa penduduk laki-laki dan 95.074 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Mesuji mengalami pertumbuhan sebesar 0,73 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109,49. Kepadatan penduduk di Kabupaten Mesuji tahun 2018 mencapai 91 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Simpang Pematang dengan kepadatan sebesar 186 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mesuji Timur sebesar 38 jiwa/Km². Dengan jumlah populasi penduduk yaitu :

Tabel 14. Populasi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2010 dan 2018

Nama Kecamatan	Penduduk Populasi			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
	2010	2010	2018	2000-2010	2010-2018
1 WaySerdang	40.928	41.071	44.075	1.70	0.90
2 SimpangPematang	23.175	23.266	26.029	2.23	1.43
3 PancaJaya	15.354	15.400	15.778	1.11	0.31
4 Tanjung Raya	33.949	34.068	36.747	1.76	0.96
5 Mesuji	20.036	20.095	20.538	1.08	0.28
6 MesujiTimur	29.751	29.844	31.025	1.29	0.49
7 RawajituUtara	24.213	24.286	24.976	1.16	0.35
Mesuji	187.406	188.030	199.168	1.14	0.73

Sumber : BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2019

4.3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu :

1. Visi :
Mewujudkan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang Santun, Cepat, Tepat, dan Cermat.
2. Misi :
 - a. Pelayanan dengan "PASTI"(Profesional Adil Senyum Tepat Waktu dan Ikhlas).
 - b. Pelayanan cepat dan tepat sesuai prosedur.
 - c. Ciptakan suasana nyaman dan representatif di ruang pelayanan dan ruang tunggu.

Adapun struktur kepengurusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

Tabel 15. Struktur Struktur kepengurusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu

No	Nama	Jabatan
1	Waskita Joko Suryanto, S.H, S.IP, M.H	Kepala Badan Pendapatan
2	Ir. Firstiana Yogi Anugrahi	Sekretaris Badan
3	Hendri Afanto, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Handayani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	Anita Pebriyanti, Amd	Bendahara Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Resti Alfina, Amd	Bendahara Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	A. Dany Samantha D, S.E, M.M	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan
8	Ilham Tesa Putra, S.T, M.M	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi
9	Novri Wijayanti, M.M	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional
10	Tri Sari Werdoningsih, S.E	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
11	Ali Alhamidi, S.P	Kepala Bidang Pendapatan
12	Indra Marza, S.E, M.M	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional
13	Julia Darma, S.E, M.M	Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Distribusi
14	Yusuf Habibi Umar, S.Kom	Kepala Sub Bidang Pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan

Sumber : Struktur Kepengurusan Bapenda Pringsewu

4.4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji tahun 2021 membuat tiga (3) dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) Baru yaitu Badan pendapatan daerah (Bapenda) Dinas Kominfo dan Dinas perempuan dan anak. Bapenda itu merupakan pecahan dari Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji yaitu sebagai berikut :

Tabel 16. Struktur Struktur kepengurusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji

No	Nama	Jabatan
1	M. Rois Mandala, S.H, M.Kn	Kepala Badan Pendapatan
2	Lydia Oktavia, S.Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Rosidah, S.E	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Chandra Williyando, S.H, M.H	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi
5	Amin Dafik, S.E, M.M	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
6	Rizki Mayasari, S.E	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
7	Dedi Martadinata, S. Hi	Bidang PBB dan BPHTB
8	Risna Huraida, S.E	Sub Bidang Pendataan, Penilaian, Pengolahan Data dan Informasi
9	Haris Prasajo, S.Si	Sub Bidang Penetapan, Verifikasi, Penagihan PBB dan BPHTB
10	Imradona, S.H	Bidang Pajak Daerah Lainnya
11	Novi Analan, S.E	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
12	Rita Marsini, S.E	Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sumber : Struktur Kepengurusan Bapenda Mesuji

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian mengenai tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji tidak stabil karena mengalami kenaikan serta penurunan. Hal tersebut menyebabkan bahwa tingkat efektivitas PAD yang ada tidak mencerminkan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan daerah. Besarnya pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan dari dana perimbangan, sedangkan besarnya penerimaan PAD sangat dipengaruhi oleh sumber yang berasal dari lain-lain PAD yang sah. Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Pringsewu tahun 2016-2020 bersifat *fluktuatif* dengan rata-rata rasio sebesar 103,79% termasuk ke dalam kriteria sangat efektif, sedangkan Kabupaten Mesuji tahun 2016-2020 tingkat efektivitas PAD bersifat *fluktuatif* dengan rata-rata rasio sebesar 90,33% termasuk ke dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas PAD yang dimiliki Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah sangat rendah karena dalam 5 tahun terakhir kontribusi PAD tersebut tidak pernah di atas 10% dari pendapatan daerah.
2. Faktor Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD, hal ini dibuktikan dari *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* yang dilakukan serta berdampak terhadap jumlah penerimaan PAD. *Intensifikasi* dan *ekstensifikasi* sangat efektif dilakukan karena pelaksanaan dari strategi tersebut sesuai dengan tingkat efektivitas PAD yang tergolong ke dalam kriteria efektif dalam 5 tahun terakhir, walaupun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan

daerah tidak pernah berkontribusi lebih dari 10 % dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh tingginya derajat sentralisasi perpajakan. Jenis pajak utama yang produktif di Kabupaten diambil alih oleh Pemerintah Pusat, walaupun pajak daerah di Kabupaten beragam tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka peneliti menghasilkan sejumlah saran yaitu :

1. Mengembalikan kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kembali kepada Kabupaten/Kota. Dikarenakan sistem sentralisasi dalam bidang perpajakan mempunyai pengaruh terhadap jumlah penerimaan PAD yang ada di daerah khususnya di kabupaten karena terjadi perbedaan dengan daerah perkotaan yang mempunyai sumber penerimaan dari sektor pajak yang banyak. Walaupun di Kabupaten jumlah sumber penerimaan dari sektor pajak beragam akan tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan menjadi sumber penerimaan. Sehingga menjadi sangat terbatas apalagi dengan adanya peraturan sentralisasi pada Pemerintah Pusat serta Provinsi dibidang perpajakan.
2. Penetapan dan optimalisasi retribusi di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. Ketidakmampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalisasi salah satu penerimaan dari retribusi daerah menyebabkan rendahnya tingkat realisasi dari apa yang sudah ditargetkan. Penetapan sumber-sumber baru retribusi daerah serta mengoptimalisasikan retribusi menjadi penting karena akan berpengaruh dalam PAD yang diterima.
3. Memperkuat proses pemungutan hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif-tarif yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masa sekarang, dan menyusun strategi untuk para wajib pajak serta

masyarakat umum yang dilihat dari potensi maupun kontribusinya berdasarkan skala prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abimanyu, A dan Megantara, A. 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Kompas. Jakarta.
- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. 2019. *Kabupaten Pringsewu dalam angka 2019*. Badan Pusat Statistik. Pringsewu.
- Bungin, B. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Pernada Media Group. Jakarta.
- Cheema, M.G.S and Rondinelli D.A. (1983). *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications Conyer. Beverly Hills/London/New Delhi.
- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. PT Indeks. Jakarta.
- Devas, N. et. al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Fuad, A., dan Kandung, S.N. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFU Unbraw. Malang.
- Makhya, S. 2004. *Ilmu Pemerintahan : telaahan awal*. FISIP UNILA. Bandar Lampung.
- Marbun, B.N. 2003. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Musgrave, R.A and Musgrave, P. 1984. *Public Finance in Theory and Practice*. New York. McGraw-Hill Inc.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan : mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*. Refika Aditama. Bandung.
- Stephanie, K.M. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Suaka Media. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Yustika, A. E. 2008. *Desentralisasi Ekonomi Indonesia (kajian teoritis dan realitas empiris)*. Bayumedia. Malang.

Jurnal :

- Asmuruf, M.F., Rumat, V.A., Kawung, G.M.V. 2015. Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah* Volume 15 Nomor 5.
- Asnariza., Hamzah, A., dan Syechalad, N. 2014. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 2 Nomor 4.
- Budiani, N.W. 2008. Jurnal Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal ekonomi dan sosial* Volume 2 Nomor 1.
- Hardiwinoto. 2004-2005. Korelasi Timbal Balik Antara Good Government dengan Good Corporate Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis. *Jurnal Unimus Value Added* Volume 2 Nomor 1.
- Julastiana, Y., dan Suartana, I.W. 2012. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Universitas Udayana*.

- Laksmi, G.A.S.W., dan Supadmi, N.L. 2014. Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya pada Pendapatan Daerah. *Jurnal E-Akuntansi Udayana* Volume 9 Nomor 2.
- Novriansyah, M. F., Mukhlis, M., Budiono, P., Makhya, S. 2021. Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota, Penyangga Kota, Dan Jauh Dari Kota. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*. Volume 11 Nomor 2.
- Putry, N., dan Abdullah. 2011. Jurnal Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi* Volume 1 Nomor 3. 268-287
- Rahmawati, N.K.E., dan Putra, I.W. 2016. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi* Volume XV Nomor 3. 1767-1795.
- Rahmayati, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Eka Cida* Volume I Nomor 1. 40-54.
- Safitri, M.L.E. 2015. Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Volume 6 Nomor 2.
- Sriyana, J. 2009. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Unisia* Volume 32 Nomor 27.

Tesis :

- Kori, E. 2001. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Kota Bengkulu* (Tesis). UGM. Yogyakarta.

Dokumen atau Peraturan :

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sidik, M. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Internet :

<https://mesujikab.bps.go.id/> diakses pada 13 September 2020 pukul 15.00 WIB

<https://mesujikab.go.id/selayang-pandang/sejarah-kabupaten-mesuji/> diakses pada
13 September 2020 pukul 14.00 WIB

<https://pringsewukab.bps.go.id/> diakses pada 13 September 2020 pukul 15.00
WIB